

**PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT  
DURIAN KECAMATAN OBA UTARA KOTA MADYA TIDORE  
KEPULAUAN PROPINSI MALUKU UTARA**



**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana Ilmu  
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas "45" MAKASSAR**

Oleh

**HASSANUDIN ABDUL SALAM**

**45 10 021 009**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45" MAKSSAR**

**2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT DURIAN KEC.OBA UTARA PROV. MALUKU UTARA

**Hassanudin.Abdul Salam**

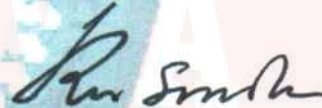
**4510021009**

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dra. Hj. Juharni, M.Si**



**Drs. A.M. RusdiMaidin, SH., M.Si**

**Diketahui Oleh;**

Dekan FISIP, Universitas "45"

Ketua Jurusan Ilmu Politik,



**Dra. Hj. Juharni, M.Si.**



**Drs. H. Misbahuddin Ahmad, MS**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari, *Selasa tanggal delapan bulan tujuh tahun dua ribu empat belas* Skripsi dengan Judul "***Pengelolaan Program Pembangunan Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kabupaten Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara***"

N a m a : **Hassanudin Abdul Salam**


Nomor Stambuk : **4510021009**

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Negara (S-1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

**Pengawas Umum;**

  
**Dra. Hj. Juharni, M.Si.**

Dekan FISIP, Universitas "45"

**Panitia Ujian;**

  
**DR. Syamsuddin Maldun, M.Pd**

Ketua

  
**Drs. H. Misbahuddin Ahmad, MS**

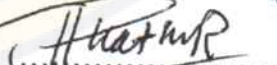
Sekretaris

**Tim Penguji;**

1. Dra. Hj. Juharni, M.Si

()

2. Drs. M. Natsir Tompo, M.Si.

()

3. Drs. Uddin B.Sore, SH., M.Si.

()

4. Dra. Asmirah, M.Si.

()

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat hidayah dan taufik-Nya serta kesehatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

Tak lupa pula Shalawat dan Salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini dan yang diberikan Rahmat untuk menuntun umat manusia kejalan yang di Rahmati Allah, serta berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-hadits yang merupakan sumber darisegala pengetahuan.

Tak lupa saya haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ibunda Ani.Hartanto dan Ayahanda Abdul Salam. Karena dengan do'a tulusnya sehingga saya mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Saya telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya sadar dengan bantuan dari banyak pihak karya tulis ini dapat terselesaikan seperti saat ini. Maka dari semua itu saya menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Aksa Mahmud selaku ketua Yayasan Universitas "45".
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng. Selaku Rektor Universitas "45"  
Makassar
3. Ibu Dra. Juharni, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
4. Bapak Drs. Misbahuddin Achmad, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu  
Administrasi Negara.
5. Ibu Dra. Juharni, M.si. Selaku Pembimbing I.
6. Bapak Drs. A. M. Rusdi Mading, SH., M.Si. Selaku Pembimbing II.
7. Bapak / Ibu serta seluruh pegawai dan staf Pemerintahan Desa serta  
masyarakat Desa Bukit Durian.
8. Bapak / Ibu penguji yang telah memberikan berbagai masukan dan kritikan  
yang bersifat membangun sehingga saya dapat termotifasi dengan baik, dan  
dengan adanya pertanyaan tersebut saya dapat menyempurnakan skripsi ini  
walaupun sebenarnya kesempurnaan itu bukan milik kita.
9. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah mengejar dan membimbing saya tentang  
banyak hal yang berkenaan dengan disiplin ilmu yang saya geluti selama  
perkuliahan.
10. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas pelayanannya selama  
ini.
11. Untuk , Adik-adikku yang tercinta Anti Abdul Salam, Trisandi Abdul Salam,  
Nur Aulia Rahma Dani Abdul Salam Dan Rizki Abdul Salam yang

selalu memberikan saya suport. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga dariku.

12. Keluarga yang tercinta selama saya berada di kota daeng ini, Bapak Rumat sekeluarga, Bapak Parang Sekeluarga, Dan Bapak Empo Sekeluarga Di Goa yang selalu menyayangiku selama saya disini, Insya Allah saya tidak akan melupakan kebaikan dari kalian semua.
13. Sodaraku Kanda Abdul Latif Anwar dan Kanda Rustam yang telah Mendukung saya.
14. Keluarga besar yang ada di kota Nabire PAPUA, Abang Amir Sekeluarga, Dan Di Babang HalSel Maluku Utara Om Anwar.Hartanto Sekeluarga, Nenekku Maryam Hartanto, Om Ade Sekeluarga,dan Om Dulah Hartanto Sekeluarga dan seluruh keluarga besar Hartanto yang tidak sempat saya sebutkan semua Terima kasih atas segala perhatian dan suportnya.
15. Teman-teman KKN KWU BALI Angkatan VI Khususnya teman-teman kelompok KKN KWU-UKIRAN di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaenten Gianyer, Khususnya ( Haryati, Bunda Rante Bandoso, M.Iftitah, Emang, Hendrawati, Hendra Wito, Mei,) 'N' Teman-teman lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
16. Teman-teman Sospol : Ronal Konyora, Rizal Tugulola, Ridwan, ilyas, samosir alias pace, eswan,erick, Kanda Mulkam, Kanda Sesarius bubun alias Stingki. S.Sos, Roy.H Taif, ikhsan, jaraan Sulaiman.S.Sos, Alfian,Susiyanti, Mustika Sakka, dll yang telah membantu dan mendukung proses penulisan skripsi ini.

17. Teman-teman Kosku di sukaria 11 No 21 Pondok Top Eleven, Rooney, opan, Roy alias Costa, Bang Aiy, Anto dan Adit Saya sangat senang bisa berteman dengan kalian.
18. Sahabatku Ronal Konyora, Windy Dan Juwita Sari S.Sos terima kasih atas suport, kabaikan, dan Perhatiannya kalian dalam penyusunan skripsiku ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya selaku penulis sadar bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun, sehingga menjadi awal untuk menuju ke masa depan, tulisan ini akan menjadi salah satu bacaan yang mendidik.

Semoga Allah SWT selalu memberika Rahmat-Nya kepada mereka yang benar-benar menuntut ilmu pengetahuan.

Wallahu Ilaa Aquamuttari Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2014

Penulis

Hassanudin Abdul Salam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pengelolaan.....	16
B. Pengertian Program.....	18
C. Pengertian Pemerintahan Desa.....	20
D. Pembangunan desa.....	24



E. Pengertian Pembangunan Desa.....	33
F. Pengembangan SDM ,Pembangunan Infrastruktur Pedesaan .....	35
G. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan .....	39
H. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pembangunan.....	41
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Geografis.....	47
B. Keadaan Demografi .....	48
C. Struktur organisasi.....	50
D. Tugas dan Fungsi.....	52
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian.....	59
B. Faktor-faktor yang menghambat program APBD-Desa .....	66
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel Jumlah Responden Pada Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	13
2.	Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	48
3.	Tabel Tingkat Status Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	49
4.	Tabel Jumlah Pegawai Pemerintahan Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	51
5.	Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintahan Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	52
6.	Tabel Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	60

7.	Tabel Penilaian Responden Mengenai Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pada Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	61
8.	Tabel Tanggapan Responden Mengenai Tanggung Jawab Pemerintahan Desa Terhadap Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	62
9.	Tabel Penilaian Responden Mengenai Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara.....	63
10.	Tabel Penilaian Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Pemerintahan Desa Terhadap Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .....	64

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Kerangka Konseptual ..... 11
2. Gambar 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Di Desa Bukit Durian..... 50



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah tata kelola birokrasi pemerintahan tentu sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat terutama dalam penyediaan pelayanan publik atau bahkan birokrasi diidentikkan dengan sesuatu yang lama. Hal tersebut karena birokrasi terikat oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di -setiap daerah, terutama di desa atau kelurahan.

Akhir-akhir ini banyak orang membicarakan masalah krisis kepemimpinan. Konon sangat sulit mencari kader-kader pemimpin pada berbagai tingkatan. Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat.

Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan

moral yang tinggi. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola tata pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Namun dibalik semua itu, telah muncul suatu pemikiran yang positif yaitu munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang menimbulkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari reformasi adalah untuk menciptakan masyarakat sipil (civil society) dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai good governance serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat.

Terdapat beberapa persoalan utama yang merupakan bagian dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang efeknya masih dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang hidup pada masa sekarang ini, yang sekaligus merupakan indikator penyebab terjadinya krisis multidimensi yang masih melanda bangsa Indonesia hingga saat ini. Ketika permasalahan tersebut diidentifikasi, maka ujung dari permasalahan tersebut bermuara kepada

terjadinya pendangkalan partisipasi rakyat dalam program pembangunan daerah serta semakin melemahnya posisi nilai tawar rakyat dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan kehidupan rakyat. Rakyat bukan dijadikan sebagai subjek dalam kehidupan demokrasi dan juga bukan menjadi subjek didalam pembangunan.

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara RI.

Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

(Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004) Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Otonomi daerah memiliki arti otonomi desa bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreaitivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta



menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa atau setingkat Kelurahan memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu.

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas diperlukan proses yang terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu perencanaan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan

kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan tingkat Desa maupun Kelurahan. Olehnya ketetapan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut.

PP 72 tahun 2005 Pasal 64 ayat 1 mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa. Dengan demikian, desa wajib memiliki dua dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJM-Desa dan RKP-Desa. Semua regulasi yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa memberi amanah bahwa partisipasi langsung warga masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan kunci utama bagi pembangunan yang pro rakyat miskin dan perempuan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJM-Desa dan RKP-Desa) merupakan pintu masuk bagi upaya peningkatan partisipasi langsung warga masyarakat dalam pembangunan. Pararel dengan upaya membangun negara yang demokratis (democratic state) yang didasari pada nilai dan prinsip good governance, dalam jangka panjang, RPJM-Desa dan RKP-Desa

merupakan “instrumen pembangunan” yang efektif untuk mempromosikan otonomi desa yang lebih luas serta memperkuat pembangunan emansipasi dan demokrasi desa (village democracy).

Pada tingkat pengimplementasiannya, berbagai inisiatif lokal (pilot projects) telah dikembangkan untuk memfasilitasi desa menyusun perencanaannya sendiri secara partisipatif, transparan dan akuntabel

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan.

Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Oleh karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya.

Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di Desa Bukit Durian. Di mana tata kelola birokrasi pemerintahan desa belum mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat dan belum mampu menampung segala aspirasi masyarakat, agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat apalagi dalam hal pembangunan.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka secara spesifik dalam penelitian ini di jabarkan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana program pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pembagunan Desa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat perencanaan pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintahan desa setempat untuk mengetahui tentang Bagaimana Penerapan PP 72 Tahun 2005 tentang desa dalam hal dan kelurahan

Pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara .

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu Pengetahuan tentang suatu Pelaksanaan PP 72 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan dalam hal Pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara.

**D. Kerangka Konseptual**

Pembangunan sangat ditentukan oleh adanya pengertian, kesadaran, dan partisipasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang giat-giatnya dilaksanakan dewasa ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab semua elemen masyarakat.

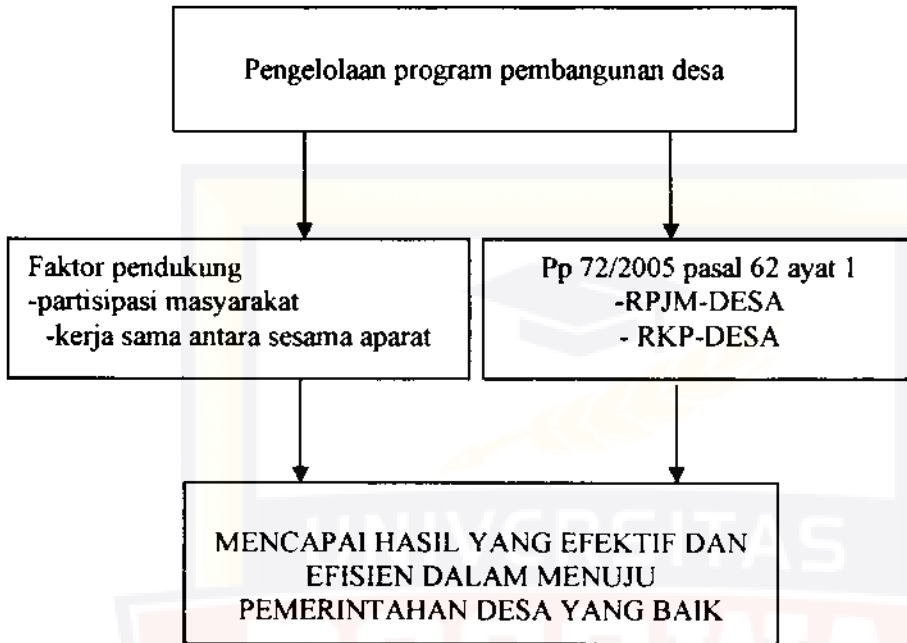
Diperlukan keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi kemudian mengolah semua potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan agar tercipta pembangunan yang maksimal. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan perlu adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Namun demikian tonggak utama penggerak dalam pembangunan di tingkat kelurahan adalah pemerintah kelurahan dalam hal ini Lurah dan aparaturnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 14 yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tersebut maka lebih lanjut tentang peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan diuraikan ke dalam tiga indikator yakni pembina, pengayom dan pelayan masyarakat.

Keberhasilan suatu pembangunan harus senantiasa beriringan dengan bagaimana menggalang keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang esensial dalam menunjang pembangunan di daerah yang semi perkotaan dalam hal ini tingkat Kelurahan, tetapi partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya, melainkan pemerintah harus aktif untuk terus mendorong dan meningkatkan motivasi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini tentu saja ada beberapa faktor yang berpengaruh baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Sasaran utama pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik meterial maupun non meterial secara merata. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di gambarkan dalam bentuk bagan berikut :

## KERANGKA KONSEPTUAL



### E. Metodologi Penelitian

#### 1. Tipe dan Dasar Penelitian

##### a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dimaksudkan untuk menguraikan data dengan berdasarkan pendapat responden.

##### b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden dengan

melalui data observasi, interviu, serta kuisioner dengan ciri khusus dan kesimpulannya mencerminkan hanya untuk desa yang bersangkutan.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi (pengamatan) yaitu peneliti merencanakan melakukan pengamatan secara langsung objek yang diteliti untuk memperoleh data dan bahan keterangan dalam penyusunan proposal ini.
- b. Interview (wawancara) yaitu peneliti merencanakan melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab terhadap responden sesuai dengan jumlah responden yang ditetapkan.
- c. Kuesioner (angket) yaitu peneliti merencanakan melakukan pengambilan data dimana penulis membuat sejumlah daftar pertanyaan kemudian disebarakan kepada para informan untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dalam daftar pertanyaan tersebut.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah jumlah seluruh objek yang akan diteliti oleh karena itu Yang menjadi Populasi dalam rencana penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada kantor desa Bukit Durian Kecamatan. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang berjumlah 9 orang dan ditambah masyarakat 31 orang.



b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan responden dalam penelitian. Karena jumlah populasi cenderung kecil, untuk efisiennya maka teknik sampel menggunakan Probability sampling atau sampel jenuh, yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, sebanyak 40 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 01**  
**Jumlah Responden Pada Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian**  
**Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan**  
**Propinsi Maluku Utara**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pegawai Kantor Desa	9 Orang
2.	Masyarakat	31 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>40 Orang</b>

*Sumber: Pemerintahan Desa Bukit Durian, Tahun 2014*

**4. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini akan diolah dan ditabulasi kedalam tabel frekuensi, sedangkan data yang diperoleh dari informan dan data sekunder akan menjadi pendukung dalam analisis yang menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Rumusan yang digunakan yakni:

$$\text{Nilai} = \text{Skor} \times \text{Frekuensi}$$

$$\text{Rata-rata Skor} = \frac{\text{Nilai}}{N}$$

$$\text{Rata-rata Persentasi} = \frac{\text{Rata-rata Skor}}{\text{Banyaknya Klasifikasi Jawaban}} \times 100\%$$

Banyaknya Klasifikasi Jawaban

Selain tabel frekuensi analisa juga dapat dilakukan dengan skala likert untuk mempermudah analisa maka pertanyaan yang diajukan kepada responden diberi gradasi sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Pemberian skor dimulai dari nilai tertinggi dengan 5, 4, 3, 2, 1.

- Sangat baik = 5
- Baik = 4
- Kurang Baik = 3
- Tidak Baik = 2
- Sangat Tidak Baik = 1

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi dalam Skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka yang Berisi Pengertian Birokrasi Pemerintahan, Konsep Birokrasi Pemerintahan, Pengertian Pemerintahan, Pengertian Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pengertian Pembangunan Desa, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan Sumberdaya Manusia Yang Handal, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Pembangunan.
- BAB III** Gambaran umum lokasi yang berisi tentang keadaan geografis, keadaan demografi, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi
- BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi : Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian, Faktor Penghambat Pelekasanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran yang berisi : Kesimpulan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN PENGELOLAAN**

pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. satu yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Bila pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama dengan orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi pengelolaan:

- **ROBERT T. KIYOSAKI & SHARON L**

Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi

- **JAZIM HAMIDI & MUSTAFA LUTFI**

Pengelolaan merupakan pengertian yang lebih sempit daripada kepemimpinan

- PGRI

Pengelolaan adalah suatu keahlian yang diperlukan untuk memimpin, mengatur, menggerakkan waktu, ruang, manusia, dan dana untuk mencapai tujuan tertentu

- AA DANI SALISWIJAYA

Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif

- IBRAHIM MAMAT

Pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan pengemblengan semua elemen yang ada di sekolah.

Jadi Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

- Pengertian Manajemen

Manajemen dapat diartikan sebagai tindakan atau kemampuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan menggunakan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya. Berikut ini

dikemukakan tentang definisi manajemen menurut para ahli sebagai berikut :

- J.G. Longenecker

Manajemen adalah suatu proses kegiatan manager dalam pengambilan keputusan, mengoordinasikan usaha-usaha kelompok dan kepemimpinan.

- Kast dan Rosenzweig

Manajemen itu meliputi koordinasi orang-orang dan koordnasi sumber-sumber materil untuk mencapai tujuan organisasi.

- Henry L Sick

Manajemen adalah sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga, manusia, dana, material, waktu, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian) supaya mencapai sasaran yang diinginkan.

## **B. Pengertian Program**

Pengertian Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.

4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.

5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. "A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives" (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

### **C. Pengertian Pemerintahan Desa**

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintah yang di beri hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagaitempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.



Desa yang di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat tersebut kemudian dilegalkan melalui UU No.32/2004 yang di sebut sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat). Adapun kelurahan bukan merupakan kesatuan masyarakat hukum karena UU No.32/2004 tidak melegalkannya kesatuan masyarakat hukum. Kelurahan hanyalah wilayah pelayanan pejabat yaitu lerah, yang di beri tugas oleh bupati/wali kota di bawah koordinasi camat.

Ada beberapa pendefinisian desa menurut para pakar yaitu sebagai berikut : R.Bintaro (1968:95) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, polits, dan kltural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

P.J Bournen (1971:19) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mnegenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Nyoman beratha (1982:27) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di tarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang di diamioleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Tinjauan tentang Desa dan Kelurahan Menurut Kamus Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai ;

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun;
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalam sebagai lawan kota);
3. Tempat, tanah, dan daerah.

Dari pengertian ini, maka desa memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota sekaligus bukan kota; (2) desa merupakan suatu komunitas yang homogen; dan (3) desa menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya yang berbeda di pedalaman. Desa lebih sering diperlawankan dengan kota. Menurut S. Wojowasito (1972), rural diartikan dari desa, seperti di desa, sedangkan urban diartikan dari perdesaan, bukan desa (*village*), dan urban diterjemahkan menjadi perkotaan, juga bukan kota (*town, city*). Hal ini didasarkan pada konsep rural dan urban lebih menunjuk kepada karakteristik masyarakatnya, sedangkan *village, town,*

*dan city* lebih mengacu kepada suatu unit teritorial. Dari pendapat tersebut, maka pengertian desa dapat dilihat aspek wilayah kemasyarakatan, dengan penjelasan:

- a. Dari aspek wilayah teritorial, *village*, *town*, dan *city* sebagai sesuatu unit teritorial-administratif atau berkaitan dengan kekotaprajaan (*municipality*). Dalam kaitan ini, suatu daerah dan komunitas pedesaan (*rural area and community*) dapat mencakup sejumlah desa (*village*). Demikian pula urban, bukan hanya sebagai sebuah kota (*town atau city*) dalam arti suatu kotapraja atau kotamadya, melainkan termasuk daerah-daerah di luar batas resmi kota tersebut yang masyarakatnya memiliki cara hidup kota.
- b. Dari aspek kemasyarakatan (komunitas), desa (*village*) sebagai tempat pemukiman para petani, terlepas dari ukuran besar kecilnya, tetapi juga terdapat desa-desa perdagangan dimana terdapat sejumlah orang dari desa itu yang memiliki mata pencaharian dalam bidang perdagangan (non pertanian), yang masih dikelola secara tradisional. Sedangkan, kota kecil (*town*), didefinisikan sebagai suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi lingkungan perdesaan dalam berbagai segi, tetapi kota kecil bukanlah sekedar desa yang besar.

Adapun desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang-undang 12 Tahun 2008 bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di daerah Kabupaten”.

Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusuma, mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Adapun mengenai kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

#### **D. Pembangunan Desa**

Sebelum membahas lebih jauh apa itu pembangunan desa, ada baiknya di pahami terlebih dahulu makna dari pembangunan itu sendiri. Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah).

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Begitu pula dengan Suharyanto mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi lebih baik. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Sondang P Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang

dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

- Beberapa Teori tentang Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya.

Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya

pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis. Menurut Hanafiah (1992) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. menurut haeruman ( 1997 ), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1. pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

2. sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
3. pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. menurut peraturan pemerintah republik indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
2. menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam



perencanaan melaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Definisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya menurut Wiratnolo pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi BrataKusumah, 2005).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang

tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi yang moderen dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progres*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat-at yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses

perubahan dari kehidupan tradisional menjadi moderen, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat moderen, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membadakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, “pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi

sebagai akibat dari adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

#### **E. Pengertian Pembangunan Desa**

A Surjadi (dalam buku Pembangunan Masyarakat Desa) mengemukakan arti pembangunan adalah : Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin.

Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa (Agusthoa Kaswata; 1985 : 24).

Dari beberapa pendekatan di atas pembangunan desa dapat dikemukakan :

1. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, di mana lebih dari 80% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan.
2. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan

Dengan melihat pendekatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh warga desa maka pembangunan desa dapat dilihat sebagai suatu proses. dikatakan sebagai proses karena diperlihatkan oleh jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara yang tradisional ke arah yang lebih baik maju dan lebih menekankan kepada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut.

#### **F. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Handal dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-Program yang dapat dikembangkan diantaranya:

- a. Program pengembangan pendidikan
- b. Program peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olahraga
- d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- e. Pembinaan kehidupan beragama.

f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Dari penjelasan di atas, peneliti memfokuskan pembangunan desa pada pembangunan non fisik yang lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan sumber daya manusia yang handal.

a. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian tidak terlepas dari pengembangan kawasan pedesaan yang menempatkan pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa. Lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi keluarga pedesaan menjadi faktor utama pengembangan pertanian. Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Mc. Douglass dan Friedman (1974, dalam Pasaribu, 1999) sebagai siasat untuk pengembangan pedesaan. Meskipun termaksud banyak hal dalam pengembangan agropolitan, seperti redistribusi tanah, namun konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedman adalah “kota di ladang”.

Ada beberapa alasan mengapa harus dilakukan pembangunan pertanian yaitu sebagai berikut :

1. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari terciptanya laju pertumbuhan perekonomian yang tinggi di mana alat yang dipergunakannya adalah dengan mendorong industrialisasi di kawasan-kawasan perkotaan. Kondisi ini bila ditinjau dari pemerataan pembangunan telah memunculkan kesenjangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan karena sektor strategis yang didorong dalam proses industrialisasi hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat (Soenarno, 2003)
2. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang diperkirakan pada tahun 2035 akan bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini atau menjadi 400 juta jiwa, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk berbagai jenis pangan, akibatnya dalam waktu beberapa tahun yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali lipat jumlah kebutuhan saat ini (Siswono Yudohusodo, 2002) ;
3. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena menurut Mukhtar Sarman (2009) “petani sangat identik dengan kemiskinan dan kemiskinan itu pling banyak ditemukan di desa.”



## b. Strategi dan Manajemen Pembangunan Desa

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keterpaduan pembangunan desa, di mana kegiatan-kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, di mana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, di mana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Adapun mengenai rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan diterapkan bersama dalam forum musyawarah (yang sering disebut musrembangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Untuk itu dapat dilakukan secara baik. Untuk itu para pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan desa sebagai berikut :

- a. Accountable, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- b. Transparant, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- c. Acceptable, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat.
- d. Sustainable, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

#### **G. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**

Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan merupakan pelaksana-an pemerintahan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Wajo secara terperinci tugas pokok dari aparatur pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut ;

##### **1. Lurah**

Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban. pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kelurahan.

## 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan, mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kelurahan.

## 3. Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

## 4. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pembangunan.

## 5. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

## 6. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu lurah dalam membina, Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban.

## H. Penyelenggaraan Pemerintahan dalam pembangunan

Hakekat dari pembangunan adalah perubahan secara terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu demokratisasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang arti pembangunan, antara lain:

Sondang P Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai: pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Ginjar Kartasmita secara sederhana mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan menurut Kartasmita (1996) adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun

masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri”.

Budiman (1995) membagi teori pembangunan tiga kategori besar yaitu teori modernisasi, dependensi, dan paska dependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan.

Defenisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya menurut Wrihatnolo (1999) pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari defenisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

Pembangunan desa dan kelurahan adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan respon yang antusias itu dapat terjamin.

Terlepas dari adanya perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan oleh para ilmuan, tetapi ide pokok dalam konsep pembangunan secara umum adalah:

1. Pembangunan adalah proses berarti suatu kegiatan yang terjadi secara terus-dilaksanakan.
2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Artinya jika ada suatu kegiatan yang kelihatannya sebagai suatu pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas yakni cara hidup yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Sedangkan secara khusus ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 maupun dalam keputusan menteri dalam negeri (kep.Mendagri) nomor 63 dan 64 tahun 1999 bahwa pemerintah merupakan ujung tombak bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. Menggali berbagai potensi yang dimiliki potensi desa dan kelurahan untuk tujuan pembangunan.
- b. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Mewujudkan kehidupan demokrasi di tingkat desa dan kelurahan
- d. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan kewenangan tersebut di atas pemerintah desa dan kelurahan dibantu oleh lembaga kelurahan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan kelurahan, kelembagaan tersebut membantu dalam bidang:

1. Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat yang diemban oleh lembaga adat (Pasal 43-44 Kepmendagri No. 64 tahun 1999 tentang pedoman umum mengenai desa)
2. Lembaga kemasyarakatan yang membantu tugas-tugas pembangunan pemerintah desa yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan (pasal 45-47 Kepmendagri tahun 1999)

Pembangunan daerah yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*) meliputi banyak aspek dan tantangan yaitu menyangkut :

- a. Potensi sumber daya alam (SDA) pada umumnya dapat dikatakan adalah relatif cukup, sedangkan kemampuan sumber daya manusianya (SDM) masih lemah.

- b. Prasarana dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pertanian (misalnya sumber daya air, jaringan irigasi, jalan desa dan lainnya) masih perlu pembenahan.
- c. Kelembagaan ekonomi dan sosial yang telah banyak terbentuk di daerah pedesaan ternyata belum berfungsi secara optimal.
- d. Beberapa kelemahan dan keterbatasan lainnya misalnya akses pemasaran hasil pedesaan masih sangat lemah dan terbatas.
- e. Akses petani kepada kredit (sumber daya modal) untuk pengembangan usaha perekonomian pedesaan masih relatif terbatas.

Keinginan masyarakat terhadap program pembangunan pedesaan adalah sangat luas, sedangkan dana pembangunan pedesaan yang tersedia masih relatif terbatas. Keinginan masyarakat sangat banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebutuhan. Kebutuhan merupakan program yang disusun menggunakan kriteria-kriteria yang terukur, sehingga dapat ditentukan skala prioritasnya. Bedasar dana yang tersedia terbatas itu dan usulan program yang telah disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat, selanjnya diusul prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya.

Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara langsung dan tidak langsung adalah untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh untuk memperkuat pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai tujuan antara (sasaran)



dari pembangunan pedesaan adalah mengupayakan agar desa-desa yang merupakan satuan administrasi pemerintahan yang terkecil (terbawah) dapat mempercepat pertumbuhan tingkat keswadayaannya mencapai desa swasembada.

Untuk melaksanakan (implementasi) program/proyek pembangunan pedesaan diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan dari terkandungnya semangat bersama, rasa kebersamaan dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan potensi kekuatan dan peluang, tetapi sekaligus merupakan pula tantangan yaitu bagaimana mengaktualisasikannya dalam kegiatan pembangunan secara efektif, produktif, dan dinamis.

Berangkat dari berbagai realitas yang terjadi selama ini, pemahaman akan rencana pembangunan yang berdasar pada suatu rancangan pembangunan yang matang tidak pernah terealisasi oleh pemerintah. Perencanaan pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang harus mendapatkan bimbingan khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk pelaksanaannya.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis

##### 1. Letak Geografis

Secara geografis, letak wilayah Desa Bukit Durian berada pada batas astronomis  $0^{\circ}$ - $20^{\circ}$  Lintang Utara dan pada posisi  $127^{\circ}$ -  $127,45^{\circ}$  Bagian Timur. Kota Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah  $13.862,86 \text{ Km}^2$  dengan daratan  $9.116,36 \text{ Km}^2$  dan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara Berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera barat.
- Sebelah timur Berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
- Sebelah selatan Berbatasan dengan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan pulau Moti Kota ternate.
- Sebelah barat Berbatasan dengan Laut Maluku.

##### 2. Luas Desa Bukit Durian

Pemerintahan statistik daerah kecamatan oba utara 2013 dalam upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan serta implementasi dari peraturan daerah no.13, 14, 15, dan 16 tahun 2007 serta peraturan daerah no. 1 tahun 2008 kota tidore kepulauan,kecamatan oba utara

yang mempunyai luas wilayah 376 km<sup>2</sup> ,ibu kota kecamatan berada di kelurahan sofifi. Adapun luas wilayah pada Desa Bukit Durian adalah: 39.000 km<sup>2</sup>.

## **B. Keadaan Demografi**

### **1. Keadaan Penduduk**

Jumlah Penduduk Desa Bukit Durian adalah 1362 jiwa. Untuk presentasi penduduk perempuan lebih banyak ketimbang penduduk laki-laki, Sedangkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat lebih didominasi oleh perempuan , untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 02**  
**Komposisi Penduduk Pada Desa Bukit Durian**  
**Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan**  
**Propinsi Maluku Utara**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentasi</b>
1.	Laki – laki	670	49.1 %
2.	Perempuan	692	50.9 %
<b>Jumlah</b>		<b>1362</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Kantor Desa Bukit Durian, Tahun 2014*

### **2. Pendidikan**

Pada tingkat Sekolah Dasar, baik Negeri maupun swasta jumlah sekolah sebanyak 2 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 57 orang dengan komposisi tenaga pengajar sebanyak 5 orang guru.

Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah sebanyak 2 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 60 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 7 orang guru.

Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berjumlah sebanyak 1 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 69 orang dengan tenaga pengajar sebanyak 7 orang guru.

### 3. Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Bukit Durian pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai Petani, Wiraswasta, Pegawai. Penduduk dengan mata pencaharian sebagai wiraswasta di dominasi oleh pedagang, utamanya pedagang kecil dan menengah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 03**

**Tingkat Status Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bukit Durian  
Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan  
Propinsi Maluku Utara**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi	Presentasi
1.	Petani	161	61,2%
2.	Wiraswasta	54	20,5%
3.	Pegawai	48	18,3%
<b>Jumlah</b>		<b>263</b>	<b>100%</b>

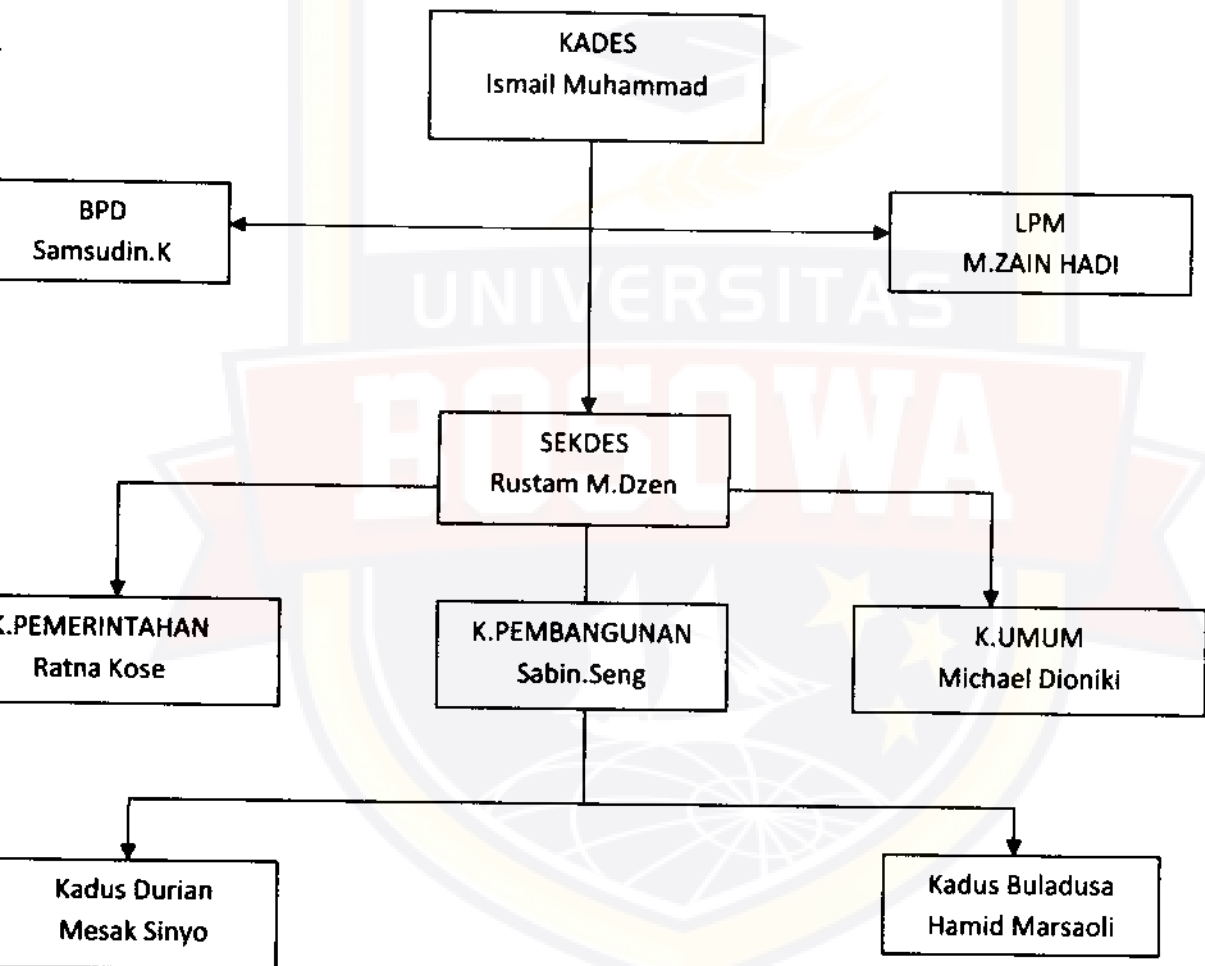
*Sumber: Kantor Desa Bukit Durian, Tahun 2014*

### C. Struktur Organisasi

## PEMERINTAHAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

### DESA BUKIT DURIAN

#### STRUKTUR ORGANISASI DESA



Berdasarkan Struktur organisasi Pemerintahan di atas, Jumlah Pegawai dan staf yang ada pada pada kantor Desa Mattiro Kanja adalah 10 orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 04**  
**JUMLAH PEGAWAI PADA KANTOR PEMERINTAHAN**  
**DESA BUKIT DURIAN**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepela Desa	1 Orang
2.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1 Orang
3.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1 Orang
4.	Sekertaris Desa	1 Orang
5.	Kaur Pemerintahan	1 Orang
6.	Kaur Pembangunan	1 Orang
7.	Kaur Urusan Umum	1 Orang
8	Kepala Dusun	2 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>9 Orang</b>

*Sumber: Kantor Desa Bukit Durian, Tahun 2014*

Sehubungan dengan pegawai yang ada pada Kantor Desa Bukit Durian maka tingkat pendidikan pegawai pada pemerintahan dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 05**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI PEMERINTAHAN**  
**DESA BUKIT DURIAN**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	SMA / Sederajat	9
2.	Strata Satu (S-1)	-
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

*Sumber: Kantor Desa BUKIT DURIAN, Tahun 2014*

#### **D. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa**

Dalam Pelaksanaan tugas struktur pemerintahan di desa Mattiro Kanja dan Fungsinya sebagai berikut:

##### **1. Kepala Desa**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ekonomi desa
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### Tugas

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.

### Hak

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat Kewajiban
- c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g. Memproses pemilihan kepala desa
- h. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.



### **3. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

#### **Tugas**

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **4. Sekertaris**

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Fungsi :
  1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
  2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
  3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
  4. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
  5. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **5. Kaur Pemerintahan**

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan

perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

b. Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multi guna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
4. Surat Keterangan Lalu Lintas
5. Surat Keterangan NTCR
6. Surat Pengantar Pernikahan
7. Surat Keterangan Naik Haji
8. Surat Keterangan Domisili

9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.
13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel
14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
15. Surat Keterangan Izin Keramaian
16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
18. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
19. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMD
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

#### **6. Kaur Pembangunan**

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- b. Fungsi :
  1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
  2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
  3. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **7. Urusan Umum**

- a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- b. Fungsi :
  1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
  2. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
  3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
  4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
  5. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
  6. Persiapan bahan-bahan laporan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

## **9. Kepala Dusun**

### **Tugas**

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

### **Fungsi**

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun

- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

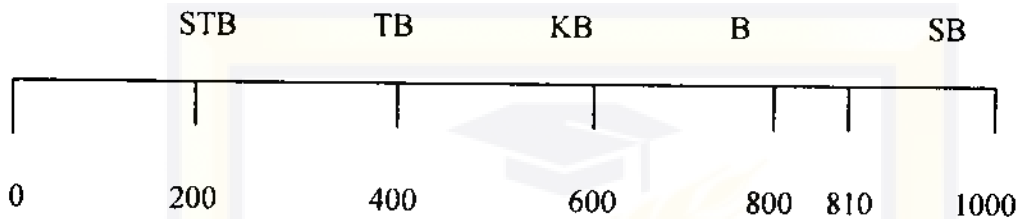
#### **A. Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian.**

Pelaksanaan Program APBD-Desa desa Bukit Durian tidak dapat berjalan sendiri tanpa sebuah proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan pada saat pelaksanaan dan penyelenggaraan program, sampai kepada hasil akhir program tersebut. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa program kerja baru akan berhasil, jika proses pelaksanaannya secara keseluruhan berjalan dengan baik, mulai dari tahap awal sampai dengan berakhirnya proses program tersebut, dan terdapat lingkungan yang kondusif untuk mengimplementasikan hasil program dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelaksanaan Program APBD-Desa adalah satu kesatuan proses mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan program yang terdiri dari beberapa tahapan proses yaitu: Menentukan kebutuhan, Menetapkan tujuan, Memilih fasilitas/sarana pelatihan yang paling sesuai, Koordinasi program serta Evaluasi program.

Jika prosedur dilaksanakan sesuai dengan hal-hal diatas maka akan diperoleh hasil Program yang sesuai dengan harapan dan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi kemajuan suatu desa. Jadi apabila Program dapat terlaksana dengan baik, maka dengan adanya persepsi responden mengenai Program APBD-Desa, desa Bukit Durian.

Adapun daftar tabel yang telah di olah melalui daftar kuesioner dapat di lihat pada lampiran 1, agar lebih memperjelas mengenai tabel lampiran tersebut, maka dapatlah dilihat melalui skala likert sebagai berikut:



Pada tabel lampiran dua skor yang diperoleh data menyangkut Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian mencapai 810 sedangkan skor ideal artinya bila pelaksanaan evaluasi program kerja di dapat sangat baik (SB) mencapai  $40 \times 5 \times 5 = 1000$  sedangkan skor sangat tidak baik (STB) mencapai  $40 \times 5 \times 1 = 200$ . Hasil yang diperoleh sebesar 810, nilai skor yang diperoleh antara (SB) Sangat Baik (1000) dan (B) Baik (800), tetapi lebih mendekati baik sehingga pelaksanaan program kerja melalui pelatihan dapat dikatakan baik.

Faktor-faktor pendukung pada program APBD-Desa, Desa Bukit Durian yaitu: Pada masalah penilaian responden tentang pelaksanaan program APBD-Desa Desa Bukit Durian 82.5%, ketersediaan sarana dan prasarana pada pelaksanaan program APBD-Desa Desa Bukir Durian 47,5%, tanggung jawab pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa Desa Bukit Durian, 57.5%, kinerja pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa Desa Bukit Durian, 50%, dan mengenai implementasi

pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa, Desa Bukit Durian 52.5%, seperti digambarkan pada tabel No.7, No. 8, No. 9, No.10, No.11.

Adapun tabel-tabel berikut yang dijelaskan dengan cara data yang telah dikumpulkan dihitung melalui frekuensi dan presentasinya dalam bentuk angka-angka sesuai dengan pengolahan data yang diperoleh dari responden di bawah ini.

**Tabel 06**

**Penilaian Responden Mengenai Pelaksanaan Program APBD-Desa,  
Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan  
Propinsi Maluku Utara**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Sangat baik	3	7.5 %
2.	Baik	33	82.5 %
3.	Kurang Baik	4	10 %
4.	Tidak Baik	0	0 %
5.	Sangat Tidak Baik	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014*

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tanggapan atau penilaian responden terhadap pelaksanaan program APBD-Desa desa Bukit Durian adalah sebagai berikut: Berdasarkan tabel tersebut di atas, ada 33 orang responden atau 82.5%, mengatakan bahwa pelaksanaan program APBD-Desa, Desa Bukit Durian dapat di katakan baik, sedangkan yang mengatakan kurang baik ada 4 orang



responden atau 10%, dan yang mengatakan sangat baik ada 3 orang responden atau 7.5%.

Selanjutnya mengenai ketersediaan Saran Prasarana pada pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 07**

**Penilaian Responden Mengenai Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pada Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Sangat baik	19	47.5 %
2.	Baik	13	32.5 %
3.	Kurang Baik	8	20 %
4.	Tidak Baik	0	0 %
5.	Sangat Tidak Baik	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014*

Berdasarkan tabel hasil responden tersebut di atas mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pada program APBD-Desa desa Bukit Durian adalah sebagai berikut: Untuk membuktikan hal tersebut melalui tanggapan responden yang menyatakan penilaiannya sangat baik ada 19 orang responden atau 47.5%, 13 orang responden menyatakan baik dengan angka presentasi 32.5%, dan yang mengatakan penilaiannya kurang baik ada 8 orang responden dengan angka presentasi 20%.

Selanjutnya untuk mengukur efektifitas kinerja pemerintahan desa dari hasil evaluasi program kerja, untuk mengetahui pilihan responden tersebut maka dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini:

**Tabel 08**

**Tanggapan Responden Mengenai Tanggung Jawab Pemerintahan Desa Terhadap Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Sangat baik	12	30 %
2.	Baik	23	57.5 %
3.	Kurang Baik	5	12.5 %
4.	Tidak Baik	0	0 %
5.	Sangat Tidak Baik	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014**

Berdasarkan tabel diatas dari 40 responden yang memberikan tanggapannya mengenai tanggung jawab pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa desa Bukit Durian adalah sebagai berikut: Ada 23 orang responden mengatakan baik dengan angka presentasi 57.5%, selanjutnya ada 12 orang responden memilih sangat baik dengan angka presentasi 30%, dan yang mengatakan kinerja pemerintahan desa masih kurang baik dengan angka presentasi 12.5% atau ada 5 orang responden yang mengatakan hal seperti itu.

Pelaksanaan program kerja efektifitasnya sangat ditentukan oleh kinerja pemerintahan desa. Adapun tanggapan responden dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

**Tabel 09**

**Penilaian Responden Mengenai Kinerja Pemerintahan Desa Terhadap Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Sangat baik	4	10 %
2.	Baik	20	50 %
3.	Kurang Baik	16	20 %
4.	Tidak Baik	0	0 %
5.	Sangat Tidak Baik	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014*

Dengan adanya efektifitas sebagaimana penilaian responden mengenai kinerja pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa desa Bukit Durian seperti terlihat pada tabel 10 di atas memperlihatkan sebagian besar responden menilai bahwa kinerja pemerintahan desa terhadap program sudah baik karena dengan adanya 20 orang responden mengatakan hal seperti itu dengan angka presentasi 50%, selanjutnya yang mengatakan kurang baik ada 16 orang responden atau 40%, dan yang mengatakan sangat baik ada 4 orang responden atau 10%.

Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan responden mengenai implementasi pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa desa Bukit Durian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 10**

**Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Pemerintahan Desa Terhadap Program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara**

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentasi (%)
1.	Sangat baik	12	30 %
2.	Baik	21	52.5 %
3.	Kurang Baik	7	17.5 %
4.	Tidak Baik	0	0 %
5.	Sangat Tidak Baik	0	0 %
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2014*

Data tabel 11 di atas memperlihatkan bahwa dari penilaian responden mengenai implementasi pemerintahan desa program APBD-Desa desa Bukit Durian mendapat respon ada 21 orang responden atau 52.5% mengatakan baik, selanjutnya yang mengatakan sangat baik ada 12 orang responden atau 30%, dan yang mengatakan masih kurang baik ada 7 orang responden atau 17.5%.

## **B. Faktor-faktor yang menghambat program APBD-Desa**

Dari apa yang menjadi pembahasan di dalam penelitian tentang program pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara Dengan berbagai hasil yang diperoleh maka pada bab ini pelaksanaannya pemerintahan yang di jalan oleh Pemerintahan Desa, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembangunan di Desa Bukit Durian, penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Desa saja melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat secara keseluruhan, salah satu wujud tanggung jawab yang dimaksud adalah sikap saling mendukung dari anggota masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat.
2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bukit Durian masih ada mengalami kendala. Adapun berbagai kendala yang menghambat keikutsertaan dalam perencanaan mengikuti pembuatan keputusan dikarenakan waktu, masyarakat tidak ada ditempat pada saat dilakukan rapat dikarenakan masyarakat pada siang hari pergi berkerja. Selain itu juga masyarakat dari hasil di lapangan masyarakat

tidak ikutserta dikarenakan tidak faham akan jalannya kegiatan rapat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bukit Durian menunjukkan keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan Rapat Desa dan adanya kegiatan Swadaya masyarakat dan kegiatan Gotong-royong di dalam masyarakat.

Mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan maupun dari kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat, maka dapatlah dipahami bagaimana luas dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan.

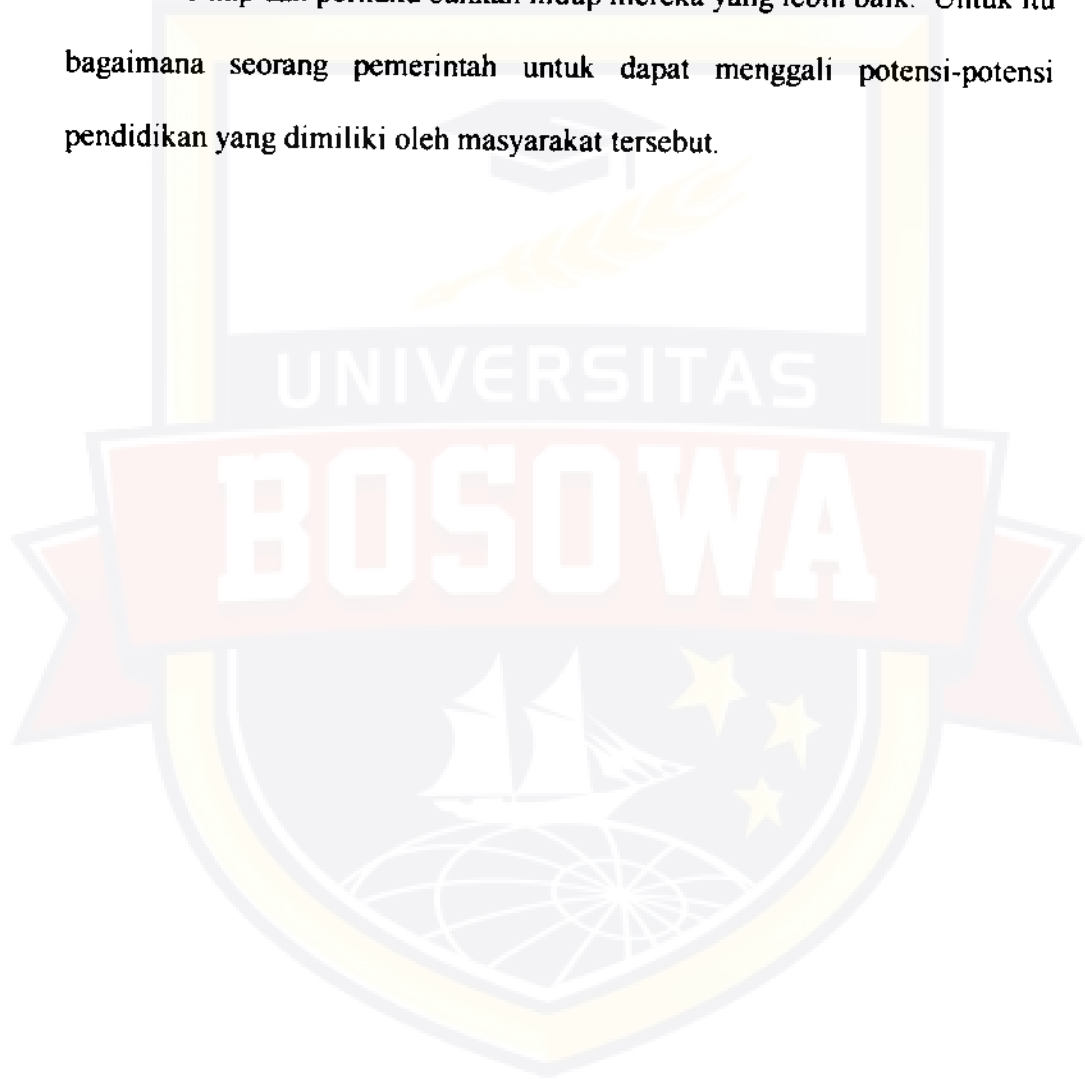
Harus diakui juga bahwa pemerintah desa tidak akan sempurna apabila ia tidak memperhatikan kekurangan ataupun kendala-kendala ataupun kebiasaan yang dihadapi langsung oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Kendala-kendala ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan, maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari aparat pemerintah desa.

b. **Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga Negara karena dengan pendidikan warga Negara akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik. Untuk itu bagaimana seorang pemerintah untuk dapat menggali potensi-potensi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bagi terlaksananya pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat.
2. Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu, sesuai dengan informasi yang ada..
3. Terdapat beberapa faktor penghambat, namun hal yang demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa atau dengan sebutan lain hukum tua lewat motivasi -motivasi yang disampaikan langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dan setiap aparatur pemerintah.
4. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena para pemerintah desa dan aparatur pemerintah sering terjun langsung



ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan.

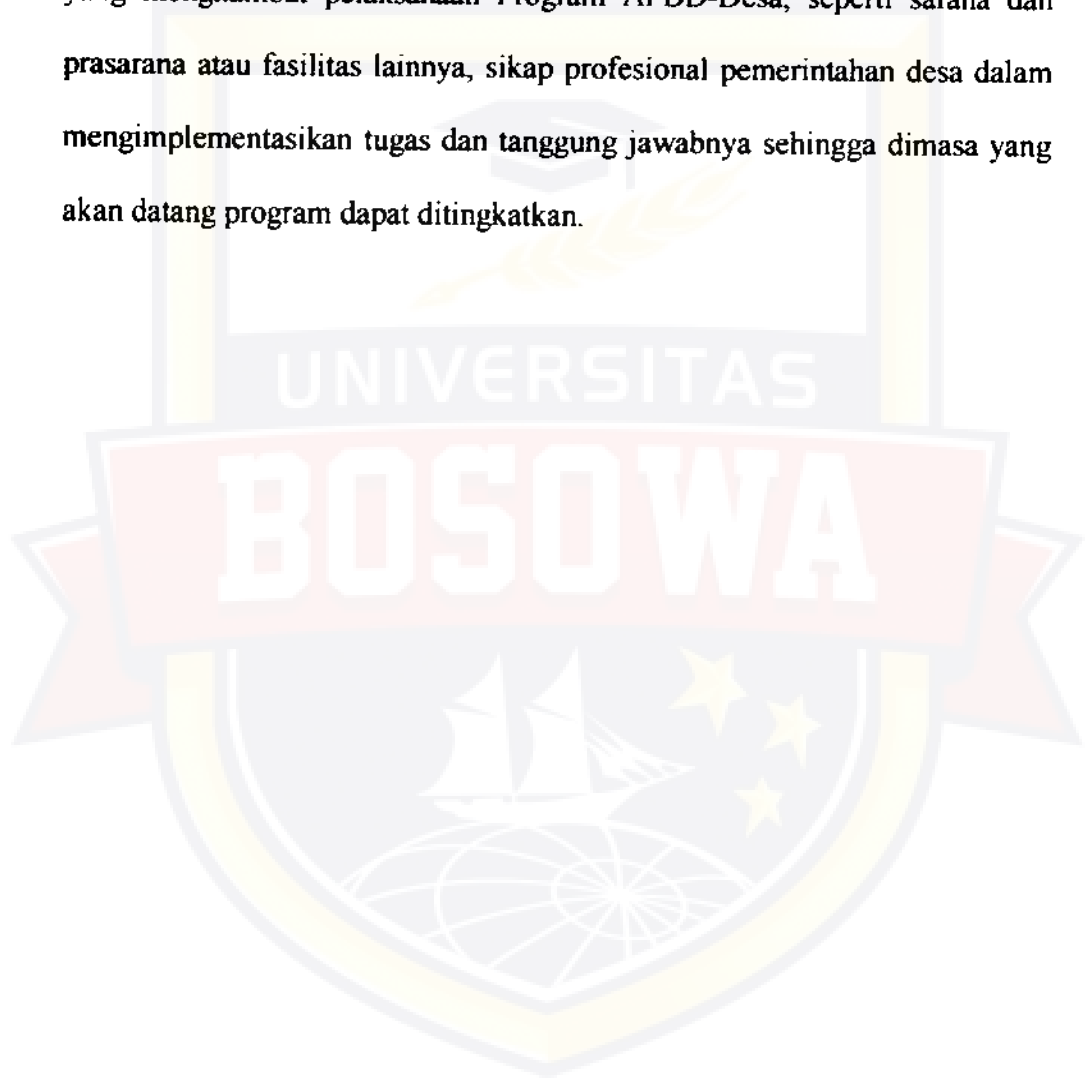
5. Pencapaian Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian telah terlaksana dengan cukup baik, karena selain didasarkan pada suatu rencana program, juga disesuaikan dengan kebutuhan desa dan unit-unit kerja yang bersangkutan. Di samping itu pelaksanaan program telah memberi manfaat yang cukup baik dalam hal pengembangannya sesuai dengan ketrampilan dan bidang masing-masing bagi Pemerintahan desa dan Masyarakat.
6. Adanya Program Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya masing. Dalam lingkungan Pemerintahan Desa telah memberikan pengaruh terhadap tanggung jawab, kinerja, motivasi pemerintahan Desa untuk di implementasi kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Agar Pencapaian Pelaksanaan Program APBD-Desa, Desa Bukit Durian dalam dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi guna lebih meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perubahan sikap pemerintahan Desa dan Masyarakat, maka disarankan kepada pemerintahan desa untuk

tetap memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengikuti peningkatan sumberdaya manusia.

2. Disarankan kepada Pemerintahan Desa untuk melihat masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan Program APBD-Desa, seperti sarana dan prasarana atau fasilitas lainnya, sikap profesional pemerintahan desa dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dimasa yang akan datang program dapat ditingkatkan.



**QUESTIONER**  
**PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT DURIAN**  
**KECAMATAN OBA UTARA KOTA MADYA TIDORE KEPULAUAN**  
**PROPINSI MALUKU UTARA**

---

**I. DATA RESPONDEN**

Nama :  
Pendidikan :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

**II. PERHATIAN**

1. Kami mohon kepada Bapak / Ibu agar Quisioner ini dijawab dengan sebenarnya agar tujuan bersama dapat tercapai dengan baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih sebelumnya.
2. Daftar Pertanyaan (quesioner) ini disusun untuk keperluan penelitian dan semata-mata untuk tujuan ilmiah, oleh karena itu mohon kiranya di isi dengan benar dan jujur sesuai dengan petunjuk pengisian. Beri tanda (x) pada jawaban yang menurut Bapak / Ibu anggap paling tepat.

**III. PERTANYAAN**

**A. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA**

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?  
(a). Sangat Baik    (c). Kurang Baik    (e). Sangat Tidak Baik  
(b). Baik    (d). Tidak Baik

2. Bagaimana penilaian anda mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pada pelaksanaan program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?  
(a). Sangat Baik   (c). Kurang Baik      (e). Sangat Tidak Baik  
(b). Baik            (d). Tidak Baik
3. Sejauhmana tanggapan anda mengenai tanggung jawab pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?  
(a). Sangat Baik   (c). Kurang Baik      (e). Sangat Tidak Baik  
(b). Baik            (d). Tidak Baik
4. Sejauhmana tanggapan anda mengenai kinerja pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?  
(a). Sangat Baik   (c). Kurang Baik      (e). Sangat Tidak Baik  
(b). Baik            (d). Tidak Baik
5. Sejauhmana tanggapan anda mengenai implementasi pemerintahan desa terhadap program APBD-Desa, Desa Buki Durian Kecamatan Oba Utara Kota Madya Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara?  
(a). Sangat Baik   (c). Kurang Baik      (e). Sangat Tidak Baik  
(b). Baik            (d). Tidak Baik

**TABEL 1**  
**PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BUKIT**  
**DURIAN KECAMATAN OBA UTARA KOTA MADYA TIDORE**  
**KEPULAUAN PROPINSI MALUKU UTARA**

No. Responden	Jawaban Responden Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja					Jumlah
	1	2	3	4	5	
	1	4	5	5	4	
2	3	5	3	3	5	19
3	4	4	3	5	4	20
4	4	5	5	4	4	22
5	5	3	4	4	4	20
6	4	4	4	3	4	19
7	4	5	4	5	5	23
8	4	3	5	4	5	21
9	4	5	4	3	5	21
10	4	5	4	3	5	21
11	4	4	5	3	5	21
12	3	4	5	3	5	20
13	4	5	5	4	4	22
14	4	4	4	4	4	20
15	4	3	4	4	4	19
16	4	5	4	4	3	20
17	4	5	4	4	4	21
18	4	5	4	3	3	19
19	4	5	5	4	4	22
20	4	3	4	3	5	19
21	5	4	5	4	3	21
22	5	5	4	3	4	21
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	5	21
25	4	5	5	3	4	21
26	4	3	4	3	3	17
27	4	3	4	5	4	20
28	4	5	3	4	4	20
29	4	5	4	4	4	21
30	4	5	4	3	5	21
31	4	4	5	4	4	21
32	4	3	5	4	4	20
33	3	5	4	3	4	19
34	4	4	3	3	4	18
35	4	5	4	3	5	21
36	4	4	4	4	3	19
37	4	4	5	4	4	21
38	4	3	4	3	3	17
39	3	5	4	4	3	19
40	4	4	3	5	5	21
Jumlah	159	171	167	148	165	810

## DAFTAR PUTAKA

- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta.
- Andrianto nico. 2007. *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Bayumedia publising . Malang
- Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Desa*, Jakarta: Ditjen PMD Depdagri, 2007.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni
- Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah, pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM*. Yogyakarta.
- Habibah, Ummu. 2011. *Peranan Kepala Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dadeko Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu*. Tugas Akhir, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Albrow martin. 2007. *Birokrasi*. Pt. Tiara wacana. Yogyakarta.

Bhatta, gambir, 1996, capacity building at the local level for effective governance empowerment Without Capacity is Meaningless.

Harif nurcholis,2011, pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, jakarta : erlangga.

Prof.Dr.Sugiono 2010, Metode Penelitian Administrasi. Penerbit CV. Alfabeta Bandung.

Henry, nicholas, public administration a comparative perspektive, prentice hall, inc, new jersey, 1980,

Ismail.2009. politisasi birokrasi. ASH-SHIDDIQY. Malang.

Jurnal demokrasi & ham, vol 5. No 3. Tahun 2005. Reformasi birokrasi. Jakarta

Kuhn thomas. 1993. Peran paradikma dalam revolusi sains. PT. Remaja rosdakarya. Bandung.

Lobolo muhadam. 2011. Birokrasi dalam era keterbukaan informasi publik. Jurnal dialog kebijakan publik. Edisi september 2011. Jakarta.

